



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI BALI  
DENGAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor : W20.UM.0101-1733

---

Nomor : B/13/UN14.2.4/HK.07.00/2021

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |  |   |
|--|---|
| <b>I. Jamaruli Manihuruk</b>           | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> |
| <b>II. Putu Gede Arya Sumerthayasa</b> | : Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bali No. 1 Denpasar - Bali, yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>  |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2** **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

### **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.

### **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Fakultas, Unit Kerja dan/atau Para Ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya.

### **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak;

2. Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui facsimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali  
Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar  
Telp/fax : (0361) 228718  
E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

B. Untuk Pihak Kedua

Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Alamat : Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar  
Telp/Fax : (0361) 222666 / 234888  
E-mail : info@fl.unud.ac.id

## **PASAL 10 LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## **PASAL 11 PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangi oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pihak Pertama**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali**



**Jamaruh Manihuruk  
Kepala Kantor**

**Pihak Kedua**  
**Fakultas Hukum  
Universitas Udayana**

  
**Putu Gede Arya Sumerthayasa**  
Dekan